



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Djamaludin**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Wiranto**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

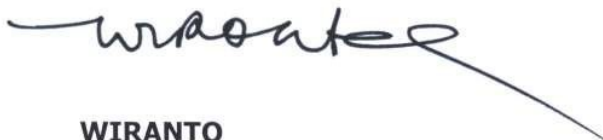
Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


WIRANTO

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,


A. DJAMALUDIN

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	1. Pencapaian Skala <i>Minimum Essential Force</i> (MEF). 2. Kesepakatan Renegosiasi KF-X/IF-X.	68,9% 1 Dok
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	1. Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 2. MoU <i>Border Cross Agreement</i> (BCA) RI-Malaysia. 3. Sertifikasi PPKT.	10% 1 Dok 3 PPKT
Terwujudnya percepatan penegasan batas negara	1. Penyelesaian 2 OBP RI-Malaysia Sektor Timur, yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600. 2. Realisasi tindak lanjut hasil <i>Senior Official Consultation</i> (SOC) dalam penyelesaian <i>Unresolved Segments</i> Batas Darat RI-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bidjael Sunan-Oben.	1 Dok 2 Giat
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I. 2. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun. 3. Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL. 4. Penilaian AKIP.	4 4 78 80

Jumlah Anggaran:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Rp 17.860.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Menko Polhukam,



WIRANTO

Jakarta, Januari 2019

**Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,**



A. DJAMALUDIN